

KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KESEPAKATAN PARIS 2015

Henni Wahyuni¹
Nim. 1102045175

Abstract

Paris Accord is one of the international environmental regimes that are trying to slow down the pace of climate change, with America as one of the pioneer during negotiation. However, after the change of American leadership in 2016, President Trump decided to quit the Paris Accord. This decision was taken as part of his campaign in 2016, due to the argument that Paris Accord is hurting America's Economy. The purpose of this research was to explain the reasons America by his new president Donald Trump quit the Paris Accord. The concepts used to perform analysis in this research are national interest and international regime. Data analysis technique used is qualitative analysis. America's exiting from the accord was part of Trump's campaign, under consideration of national interest of US, concerning the economic and political interest. The President himself argued that staying in the Paris Accord would only lead US to its own demise, by losing its competitive edge in the world. Economic interest and internal and external political interest played a major role in the making of this decision. Although Americans themselves had very differing opinions and chose to stay in the Paris Accord by doing whatever they can to help slow down the climate change.

Keywords: *USA, Paris Accord, Global Climate Change*

Pendahuluan

Fenomena perubahan iklim global merupakan polemik modernisasi dunia yang menjadi tantangan bagi generasi sekarang untuk menjaga Bumi bagi generasi selanjutnya. Laju perubahan iklim ini meningkat secara signifikan sejak revolusi industri, dan peningkatan tertinggi tercatat pada sekitar tahun 1970, yang ditandai dengan peningkatan suhu global. Peningkatan suhu ini memiliki dampak yang besar bagi keseluruhan sistem dunia. Akibat dari kemajuan teknologi masyarakat dunia memberikan pengaruh yang besar bagi lingkungan karena terjadinya hal-hal seperti kenaikan permukaan laut, berkurangnya massa es di *Greenland*, Kutub Utara dan Kutub Selatan, serta fenomena-fenomena cuaca ekstrim. Untuk menjawab tantangan ini, sebelumnya telah dilakukan kesepakatan bersama seluruh dunia untuk menahan laju perubahan iklim.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: henniwahyuni@yahoo.co.id

Protokol Kyoto adalah salah satu komitmen dunia untuk melestarikan lingkungan. Akan tetapi, regulasi dalam Protokol Kyoto tersebut dianggap kurang efektif untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Protokol Kyoto menjadi sebuah langkah untuk menuju solusi problematika ini, tetapi belum menjadi solusi karena Protokol Kyoto tidak bisa membuat negara untuk berkomitmen dalam program penanganan perubahan iklim, sekalipun mengikat dengan sanksi hukum.

Setelah Protokol Kyoto, Kesepakatan Paris (*Paris Accord*) dibentuk untuk menjadi solusi perubahan iklim. Kesepakatan ini dihasilkan pada *Confrence of the Parties* (CoP) pada pertemuan ke 21 dari *United Nations Framework on Climate Change* (UNFCCC) tanggal 30 November sampai 12 Desember 2015. Kesepakatan Paris ini mengikat dengan komitmen bersama untuk memerangi perubahan iklim.

Kesepakatan Paris diupayakan untuk dapat menjawab tantangan yang tidak mampu ditangani dengan baik oleh pendahulunya terdahulu. Protokol Kyoto, sekalipun mengikat secara hukum dan memberikan penalti atas pelanggaran perjanjian, tidak mampu menahan laju kenaikan suhu dan perubahan iklim dunia, karena hanya berdampak pada negara-negara maju saja. Negara-negara berkembang tidak memiliki keharusan untuk mengurangi emisi gas mereka, dan bahkan negara dengan kawasan hutan yang luas diberikan bantuan finansial untuk tidak memotong hutan mereka. Protokol Kyoto memberikan dorongan yang tepat untuk pemulihan lingkungan, tetapi belum menjadi jawaban karena negara-negara mampu mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut.

Berbeda dengan Protokol Kyoto, berdasarkan Kesepakatan Paris, negara-negara diberikan tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara cepat. Selain itu, disepakati pula bahwa negara-negara di dunia berkomitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi. Kesepakatan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Dalam kesepakatan Paris terdapat poin-poin utama yang merupakan kesimpulan dari Kesepakatan Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5°C.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan (*transparancy*).
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) yang merupakan mekanisme untuk menangani kerugian finansial yang mungkin dihadapi oleh negara-negara karena perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sasaran dari tujuan utama Kesepakatan Paris berlaku untuk semua negara yang telah menandatangani perjanjian, namun Kesepakatan Paris memberikan perbedaan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju dituntut untuk memimpin penurunan emisi dan menyediakan dana, sementara negara berkembang diberikan fleksibilitas untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan nasionalnya. Perbedaan tanggung jawab ini berlaku dalam berbagai aspek, termasuk diantaranya mitigasi, adaptasi, pendanaan transfer teknologi, *capacity building*, serta transparansi aksi dan dukungan. Setiap negara diminta untuk mencapai tingkat emisi tertinggi global secepatnya, dan harus melaporkan kontribusi nasionalnya sesuai dengan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) setiap lima tahun. Kontribusi nasional ini juga harus meningkat setiap periode. Negara maju diminta berkontribusi lebih besar karena *historical responsibility* yang berbeda.

Kesepakatan Paris yang didukung oleh 195 negara ini memiliki dua negara penghasil terbesar di dunia. Amerika Serikat adalah negara kedua penghasil emisi terbesar setelah Tiongkok. Hasil penelitian yang dirilis *World Resource Institute* (WRI) menyebutkan AS berada di posisi kedua dengan produksi emisi karbondioksida mencapai 5,82 miliar ton emisi CO₂. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat mengandalkan perekonomian dari sektor-sektor industri.

AS pada masa pemerintahan Barack Obama merupakan aktor utama yang mengkampanyekan pentingnya isu perubahan iklim. Obama menjalankan berbagai langkah demi tercapainya perubahan iklim. Salah satunya yaitu diadakannya perjanjian perubahan iklim dengan China pada tahun 2014. Pada September 2016 dalam masa pemerintahan Presiden Barack Obama AS meratifikasi Kesepakatan Paris sesuai dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC). AS berjanji mengurangi emisi 26-28% di bawah tingkat emisi 2015 pada 2025 termasuk emisi dari perubahan tata guna lahan dan kehutanan.

Namun agenda pemerintahan Obama yang berusaha menjaga dan berkontribusi untuk menahan laju perubahan iklim harus berhenti. Keinginan Donald Trump, presiden terpilih AS setelah Obama, tentang perubahan iklim sangat bertentangan dengan keputusan Obama. Trump sebagai Presiden AS menyampaikan bahwa Kesepakatan Paris tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional AS dan menginginkan AS untuk keluar dari Kesepakatan Paris tersebut. Sikap resmi pemerintahan Trump pada akhirnya disampaikan pada 1 Juni 2017. AS melalui Presidennya Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya akan keluar dari Kesepakatan Paris 2015. Penelitian ini akan menjelaskan alasan keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara

merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas (Robert, 2009:89).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memiliki pengertian yaitu berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri yang kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan (Sitepu, 2011:165). Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jernadu, 2008:67-69)

Konsep Rezim Internasional

Dalam hubungan internasional, Krasner memberikan definisi bahwa rezim internasional merupakan serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan dimana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu (Hennida, 2015:4). Rezim internasional berbeda dengan organisasi internasional, dimana organisasi internasional merupakan suatu institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antara aktor-aktor di dalam hubungan internasional (2015:7). Organisasi internasional dapat membentuk rezim, seperti WTO yang merupakan suatu organisasi internasional dalam mengatur masalah perdagangan barang dan jasa. Sedangkan aturan, nilai, dan prosedur yang dibuat oleh WTO itulah yang disebut sebagai rezim. Contoh lainnya yaitu ASEAN yang merupakan organisasi internasional kawasan Asia Tenggara. ASEAN Free Trade Area yang dibentuk baik dengan Tiongkok, Korea Selatan, atau Jepang merupakan sebuah rezim internasional, bukan organisasi internasional (2015:1).

Seperti yang dikemukakan oleh Krasner, rezim memiliki empat komponen yaitu prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan. Prinsip merupakan pegangan awal aktor tersebut dalam berperilaku. Norma merupakan langkah selanjutnya setelah prinsip melekat. Sehingga prinsip dan norma tidak dapat berubah

dan dipisahkan. Peraturan merupakan komponen yang sangat mudah untuk berubah. Dan komponen keempat yaitu prosedur pembuatan keputusan membutuhkan pendapat dari banyak pihak yang semakin menambah sifat subjektifitasnya. Hal-hal tersebut juga mempengaruhi objek lain seperti perilaku para aktor sehingga berdampak besar pada aturan baru yang dikeluarkan untuk menyikapi isu terkait (2015:6).

Rezim internasional memberikan sumbangan penting dengan melengkapi aspek-aspek teknis organisasi internasional formal dengan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku pemerintah. Langkah ini memungkinkan kerangka kerja yang lebih padu bagi analisis lembaga formal dan informal (Carlsnaes, 2015:397).

Seperti halnya Protokol Kyoto, Kesepakatan Paris merupakan sebuah bentuk rezim internasional yang memiliki aspek-aspek teknis organisasi internasional. Prinsip, norma, serta aturan-aturan yang ada didalamnya mampu mengatur perilaku negara yang ada dibawah rezimnya, agar dapat mewujudkan tujuan bersama yaitu menahan laju perubahan iklim global.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penulis menggambarkan alasan mundurnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris dan menjelaskan alasan pengambilan keputusan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu mundurnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris 2015.

Hasil Penelitian

Kerusakan Lingkungan Global

Kerusakan lingkungan global merupakan sebuah polemik yang dihadapi oleh dunia internasional. Konstelasi politik dan ekonomi global yang seiring perkembangan jaman, kurang memperhatikan dampak pada lingkungan, telah menyebabkan berkurangnya kualitas lingkungan. Turunnya kualitas ini menyebabkan berbagai masalah lingkungan secara global, salah satunya adalah pemanasan global.

Pemanasan global yang dikenal juga sebagai perubahan iklim, adalah kenaikan suhu rata-rata dalam sistem iklim Bumi dan efek terkaitnya. Terdapat berbagai bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa iklim sedang memanas, seperti dalam Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) WGI AR5* tentang observasi atmosfer dan permukaan Bumi dan US EPA oleh *The U.S. Global Change Research Program*.

Berdasarkan *Fifth Assessment Report* oleh IPCC, pengaruh manusia telah menjadi penyebab dominan dari kenaikan suhu yang diamati sejak pertengahan abad 20. Pengaruh terbesar manusia ini berupa emisi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan *nitrous oxide*. Proyeksi model iklim 0,3 hingga 1,7°C (0,5

hingga 3,1°F) dalam skenario emisi terendah, dan 2,6 hingga 4,8°C (4,7 hingga 8,6°F) dalam skenario emisi tertinggi. Data ini menjadi data yang digunakan untuk perhitungan proyeksi kenaikan suhu saat perancangan Kesepakatan Paris.

Perubahan iklim dimasa depan dan dampak yang terkait akan bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Efek yang diantisipasi termasuk peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, perubahan curah hujan, dan perluasan gurun di subtropis. Pemanasan diperkirakan akan terjadi di samudera dan terbesar di Arktik, dengan terus menurunnya gletser, *permafrost*, dan es lautan. Kemungkinan perubahan lainnya termasuk peristiwa cuaca ekstrim yang lebih sering seperti gelombang panas, kekeringan, hujan lebat disertai banjir dan hujan salju lebat, pengasaman lautan; dan kepunahan spesies karena pergeseran rezim suhu. Karena sistem iklim memiliki inersia yang besar dan gas rumah kaca akan tetap di atmosfer untuk waktu yang lama, efek ini akan berlangsung tidak hanya selama beberapa dekade atau berabad-abad, tetapi untuk puluhan ribuan tahun yang akan datang.

Kemungkinan respons masyarakat terhadap pemanasan global termasuk mitigasi oleh pengurangan emisi, adaptasi terhadap dampaknya, membangun sistem yang mampu menahan dampaknya, dan kemungkinan untuk rekayasa iklim di masa depan. Sebagian besar negara adalah pihak dari UNFCCC, yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah perubahan iklim antropogenik yang berbahaya. Pihak UNFCCC telah sepakat bahwa diperlukan pengurangan emisi yang menyeluruh dan bahwa pemanasan global harus dibatasi hingga di bawah 2,0°C (3,6°F) dibandingkan dengan tingkat pra-industri, dengan upaya yang dilakukan untuk membatasi pemanasan hingga 1,5°C (2,7°F).

Pemanasan global mengacu pada rata-rata global. Karena ini bukan fenomena yang seragam, efeknya dapat bervariasi menurut wilayah. Sejak tahun 1979, rata-rata global suhu daratan telah meningkat sekitar dua kali lebih cepat dari rata-rata global suhu laut, dengan 0,25°C per dekade, dan suhu laut meningkat 0,13°C per dekade. Suhu di laut meningkat lebih lambat daripada suhu di daratan karena kapasitas panas yang lebih besar dari lautan, dan karena lautan kehilangan panas jauh lebih banyak dengan penguapan. Sejak awal industrialisasi pada abad ke-18, perbedaan suhu antara belahan bumi utara dan selatan meningkat karena umpan balik dari pencairan es laut dan salju di wilayah Utara, dan karena ada lebih banyak lahan di belahan bumi utara. Dalam seratus tahun terakhir, suhu rata-rata Arktik telah meningkat hampir dua kali lipat dari tingkat dunia lainnya. Menurut penelitian pada Februari 2018 lalu, setidaknya satu wilayah yaitu bagian tenggara Amerika Serikat, telah mengalami suhu yang lebih dingin dari biasanya.

Mitigasi adalah salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan ini. Mitigasi perubahan iklim adalah upaya untuk membatasi atau mengurangi dampak jangka panjang dari perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara maju maupun negara-negara berkembang bertujuan untuk menggunakan teknologi yang lebih bersih. Teknologi bersih ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, agar dapat menekan laju peningkatan perubahan iklim. Proses ini berlangsung pada periode pertama, pada tahun 2008 hingga 2012.

Penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk dapat membantu mitigasi dan dapat menghasilkan pengurangan substansial dalam emisi CO₂. Kebijakan ini termasuk target pengurangan emisi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi. Negara-negara dianggap melakukannya dengan baik jika emisi gas rumah kaca mereka turun, jika pajak gas mereka tinggi, jika mereka tidak mensubsidi industri perikanan, jika mereka memiliki tingkat bahan bakar fosil per kapita yang rendah, dan jika mereka mengendalikan impor kayu tropis yang dipotong secara ilegal.

Kesepakatan Paris Tahun 2015

Kesepakatan Paris atau *Paris Climate Accord*, adalah kesepakatan dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang menangani mitigasi, adaptasi dan pembiayaan emisi gas rumah kaca yang dimulai pada tahun 2020. Kesepakatan tersebut dinegosiasikan oleh perwakilan dari 196 partai pada COP (*Conference of Parties*) ke-21 di Paris dan diadopsi secara konsensus pada tanggal 12 Desember 2015. Pada Februari 2018, 195 anggota UNFCCC telah menandatangani kesepakatan tersebut, dan 175 telah menjadi anggota kesepakatan tersebut. Kesepakatan Paris ini adalah kesepakatan iklim komprehensif pertama di dunia.

Dalam perjanjian Paris, masing-masing negara menentukan, merencanakan dan secara teratur melaporkan kontribusinya sendiri yang harus dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Tidak ada mekanisme untuk memaksa sebuah negara menetapkan target tertentu pada tanggal tertentu, namun masing-masing target harus melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa aspek kunci dari Perjanjian ditetapkan di tabel di bawah ini

Tabel Aspek-Aspek Kunci Kesepakatan Paris

<i>Article</i>	Isi
<i>Article 2:</i> Tujuan suhu jangka panjang	Perjanjian Paris, dalam upaya memperkuat respons global terhadap perubahan iklim, menegaskan kembali tujuan membatasi peningkatan suhu global ke bawah 2 derajat Celcius, sambil mengejar upaya untuk membatasi peningkatan menjadi 1,5 derajat.
<i>Article 3:</i> Puncak global	Untuk mencapai sasaran suhu ini, Para Pihak bertujuan untuk mencapai puncak global emisi gas rumah kaca (GRK) sesegera mungkin, mengakui pemuncak akan memakan waktu lebih lama bagi Para Pihak negara berkembang, sehingga mencapai keseimbangan antara antropogenik emisi oleh sumber dan kepindahan oleh tenggelamnya GRK di paruh kedua abad ini.
<i>Article 4:</i> Mitigasi	Perjanjian Paris menetapkan komitmen mengikat oleh semua Pihak untuk mempersiapkan, mengkomunikasikan dan mempertahankan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan untuk mengejar tindakan domestik untuk mencapainya. Ini juga menetapkan bahwa Para Pihak akan mengkomunikasikan NDC mereka setiap 5 tahun dan memberikan informasi yang diperlukan untuk kejelasan dan transparansi. Untuk menetapkan landasan yang kuat untuk ambisi yang lebih tinggi, setiap NDC yang berurutan akan mewakili perkembangan di luar yang sebelumnya dan mencerminkan ambisi setinggi mungkin. Negara-negara

	maju harus terus memimpin dengan melakukan target pengurangan ekonomi secara absolut, sementara negara-negara berkembang harus terus meningkatkan upaya mitigasi mereka, dan didorong untuk bergerak ke arah target-target ekonomi dari waktu ke waktu dalam situasi nasional yang berbeda.
<i>Article 5:</i> Waduk dan Tempat Penampungan	Perjanjian Paris juga mendorong Para Pihak untuk melestarikan dan meningkatkan, sebagaimana layaknya, waduk dan tempat penampungan GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat 1 (d) dari Konvensi, termasuk hutan.
<i>Article 6:</i> Kerjasama Sukarela/ Pendapatan Berbasis Pasar dan Non-Pasar	Kesepakatan Paris mengakui kemungkinan kerjasama sukarela di antara Para Pihak untuk memungkinkan ambisi yang lebih tinggi dan menetapkan prinsip - termasuk integritas lingkungan, transparansi dan akuntansi yang kuat - untuk setiap kerja sama yang melibatkan transfer hasil mitigasi internasional. Ini menetapkan mekanisme untuk berkontribusi pada mitigasi emisi GRK dan mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mendefinisikan kerangka kerja untuk pendekatan non-pasar untuk pembangunan berkelanjutan.
<i>Article 7:</i> Adaptasi	Kesepakatan Paris menetapkan tujuan global untuk adaptasi, yaitu dengan meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Ini bertujuan untuk secara signifikan memperkuat upaya-upaya adaptasi nasional, termasuk melalui dukungan dan kerja sama internasional. Kesepakatan ini juga mengakui bahwa adaptasi adalah tantangan global yang dihadapi oleh semua orang.
<i>Article 8:</i> Kerugian dan Kerusakan	Perjanjian Paris secara signifikan meningkatkan Mekanisme Internasional Warsawa tentang Kerugian dan Kerusakan, yang akan mengembangkan pendekatan untuk membantu negara-negara rentan mengatasi dampak buruk perubahan iklim, termasuk peristiwa cuaca ekstrim dan kejadian awitan lambat seperti kenaikan permukaan laut. Perjanjian ini menyediakan kerangka bagi Para Pihak untuk meningkatkan pemahaman, tindakan, dan dukungan terkait dengan kerugian dan kerusakan.
<i>Article 9,10,11:</i> Dukungan Keuangan, Teknologi, dan pengembangan Kapasitas	Perjanjian Paris menyediakan sistem pelaporan keuangan. Selain itu, para pihak negara maju berkomitmen untuk menyerahkan informasi indikatif tentang dukungan masa depan setiap dua tahun, termasuk tingkat keuangan publik yang diproyeksikan. Kesepakatan tersebut juga menyatakan bahwa Mekanisme Keuangan Konvensi, termasuk Dana Iklim Hijau (GCF), akan melayani Perjanjian. Kerjasama internasional dalam pengembangan dan transfer teknologi yang aman iklim serta pengembangan kapasitas di negara berkembang juga diperkuat: kerangka kerja teknologi yang dibentuk berdasarkan Perjanjian dan kegiatan pengembangan kapasitas akan diperkuat melalui, antara lain, peningkatan dukungan untuk tindakan pengembangan kapasitas dalam mengembangkan Para Pihak negara dan pengaturan kelembagaan yang tepat.
<i>Article 13,15:</i> Transparansi, Implementasi dan Kepatuhan	Perjanjian Paris bergantung pada transparansi yang kuat dan sistem akuntansi untuk memberikan kejelasan tentang tindakan dan dukungan oleh Para Pihak, dengan fleksibilitas untuk kemampuan mereka yang berbeda dari Para Pihak. Selain melaporkan informasi tentang mitigasi, adaptasi dan dukungan, Perjanjian mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan oleh masing-masing Pihak mengalami peninjauan

	internasional. Perjanjian ini juga mencakup mekanisme yang akan memfasilitasi implementasi dan mempromosikan kepatuhan dengan cara yang non-permusuhan dan non-hukuman, dan akan melaporkan setiap tahun ke CMA.
<i>Article 14:</i> Inventarisasi Global	Sebuah inventarisasi global, yang akan berlangsung pada tahun 2023 dan setiap 5 tahun sesudahnya, akan menilai kemajuan bersama untuk memenuhi tujuan Perjanjian secara komprehensif dan fasilitatif. Hasilnya akan menginformasikan Para Pihak dalam memperbarui dan meningkatkan tindakan dan dukungan mereka serta meningkatkan kerja sama internasional.

Selain aspek-aspek perjanjian tersebut, Keputusan 1/CP.21 juga menetapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan tindakan mitigasi sebelum tahun 2020, termasuk memperkuat proses pemeriksaan teknis, peningkatan penyediaan keuangan yang mendesak, teknologi dan dukungan dan langkah-langkah untuk memperkuat keterlibatan tingkat tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan tindakan sesegera mungkin sebagai persiapan pelaksanaan kesepakatan Paris, dan agar tidak memperparah kondisi lingkungan.

Sasaran dari tujuan utama Kesepakatan Paris berlaku untuk semua negara yang telah menandatangani perjanjian, namun Kesepakatan Paris memberikan perbedaan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju dituntut untuk memimpin penurunan emisi dan menyediakan dana, sementara negara berkembang diberikan fleksibilitas untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan nasionalnya. Perbedaan tanggung jawab ini berlaku dalam berbagai aspek, termasuk di antaranya mitigasi, adaptasi, pendanaan transfer teknologi, *capacity building*, serta transparansi aksi dan dukungan.

Kontribusi yang harus diberikan masing-masing negara untuk mencapai tujuan bersama di seluruh dunia ditentukan oleh negara itu sendiri dan disebut kontribusi yang ditentukan secara nasional atau *Nationally Determined Contributions* (NDCs). Pasal 3 dalam kesepakatan Paris mengharuskan negara-negara yang terlibat untuk lebih mewakili perkembangan kontribusinya dari waktu ke waktu dan menetapkan target dengan maksud untuk mencapai tujuan dari kesepakatan ini. Kontribusi tersebut harus dilaporkan setiap lima tahun dan harus didaftarkan oleh sekretariat UNFCCC. Setiap negara harus mencapai tingkat emisi tertinggi global secepatnya, dan harus melaporkan kontribusi nasionalnya sesuai dengan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) setiap lima tahun. Kontribusi nasional ini juga harus meningkat setiap periode. Negara maju diminta berkontribusi lebih besar karena *historical responsibility* yang berbeda.

Keanggotaan Amerika Serikat Dalam Kesepakatan Paris Tahun 2015

Amerika Serikat pada awalnya, di bawah pemerintahan Barack Obama, adalah salah satu anggota dari Kesepakatan Paris, bersama 194 negara lainnya yang hadir dalam *United Nations Climate Change Conference* pada Desember 2015. Perjanjian ini ditandatangani sendiri oleh Barack Obama pada tanggal 3 September 2016. Status Amerika Serikat dan China yang merupakan dua penghasil karbon dioksida terbesar, sekitar 40% dari total emisi global, memberikan dukungan besar bagi perjanjian ini.

AS melalui Obama beserta kerja sama dengan China dipandang sebagai faktor utama yang menyebabkan keberhasilan awal kesepakatan tersebut.

Kesepakatan Paris dimaksudkan menjadi warisan dari Pemerintahan Obama di bidang lingkungan ini berupaya untuk menekan dampak buruk dari aktivitas industri manusia terhadap lingkungan. Di Amerika, dampak buruk ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan peraturan dalam Kesepakatan Paris, setiap negara memberikan NDC untuk mencapai target yang diharapkan. Rencana NDC AS, yang dimasukkan oleh Pemerintahan Obama pada Maret 2015, menetapkan pengurangan gas rumah kaca hingga 26% sampai 28% di tahun 2025. Pengurangan ini ditetapkan atas data di tahun 2005, ketika AS memproduksi 6.132 juta metrik ton karbon dioksida.

Agenda pemerintahan Obama yang ramah lingkungan berupaya untuk menjaga dan melestarikan dunia agar lebih baik bagi generasi selanjutnya. Ketika negara-negara di dunia bersatu untuk perjanjian global untuk menahan laju perubahan iklim, Obama dengan pemerintahannya mendorong banyak negara lain untuk mengarahkan pandangan dan tujuan mereka untuk mencapai target tersebut. Hal ini didasari dengan investasi publik dan inovasi swasta AS dalam industri-industri berkembang seperti energi terbarukan berupa angin dan tenaga surya, industri yang berkontribusi untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan di masa depan.

Pada tanggal 8 November 2016, empat hari setelah Persetujuan Paris mulai berlaku di Amerika Serikat, Donald Trump dari Partai Republik terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak Republikan yang konservatif memperdebatkan tingkat keterlibatan manusia dalam perubahan iklim. Trump adalah seseorang yang skeptis terhadap perubahan iklim, yang pada 2012 mengatakan bahwa ia percaya konsep pemanasan global diciptakan oleh China untuk mengganggu daya saing Amerika. Selama kampanye Pemilu Trump tahun 2016, Trump berjanji untuk merevitalisasi industri batubara, yang diklaimnya telah terhambat oleh peraturan lingkungan hidup. Penolakannya terhadap mitigasi perubahan iklim tidak berubah pada bulan-bulan pertama masa kepresidenannya, ketika dia mengeluarkan perintah eksekutif untuk membalikkan *Obama's Clean Power Plan* dan peraturan lingkungan lainnya.

Pada tanggal 1 Juni 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menghentikan semua partisipasi dalam Perjanjian Paris 2015 tentang mitigasi perubahan iklim. Trump menyatakan bahwa Kesepakatan Paris akan merusak ekonomi AS dan menempatkan AS pada kerugian permanen. Selama kampanye kepresidenan, Trump telah berjanji untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, dengan mengatakan bahwa penarikan akan dilakukan untuk membantu bisnis dan pekerja Amerika. Trump menyatakan pula bahwa penarikan tersebut akan sesuai dengan kebijakan *America First*-nya.

Alasan Mundurnya Amerika Serikat dalam Kesepakatan Paris 2015

Alasan mundurnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris merupakan hasil keputusan dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor internal AS yang berusaha merestorasi industri batu baranya. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS

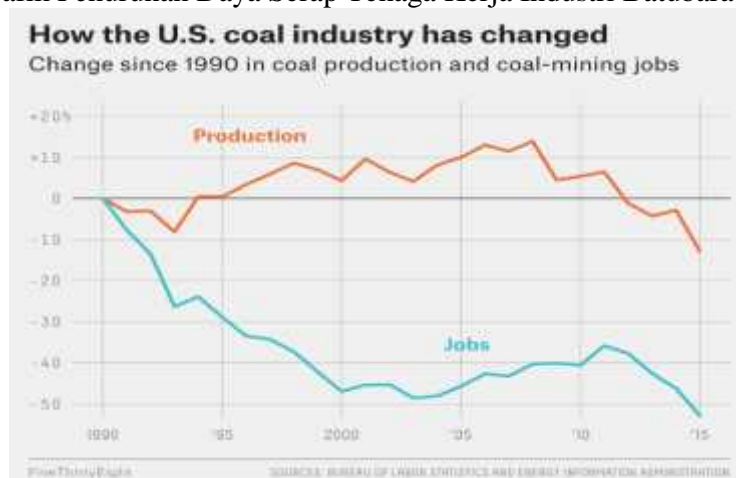
membawa perubahan-perubahan besar dalam pemerintahan Amerika Serikat, khususnya terkait dengan masalah lingkungan internasional.

Kepentingan Ekonomi

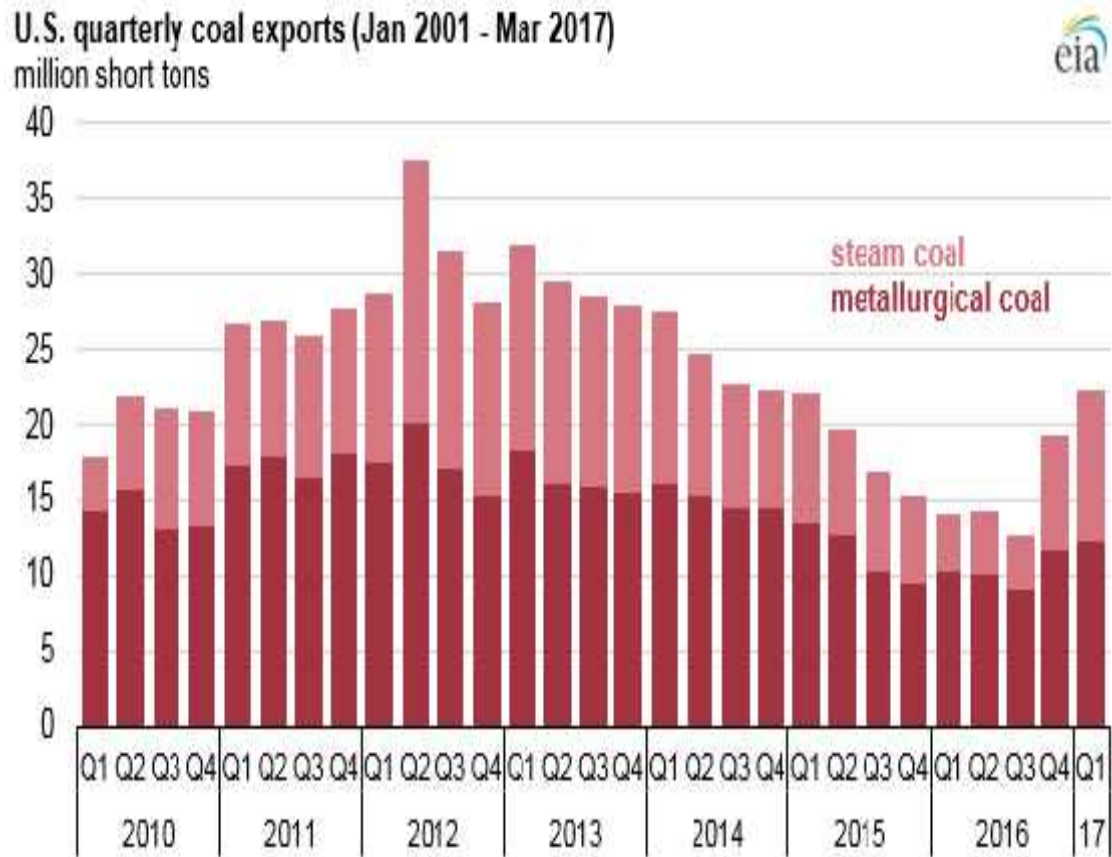
Kepentingan Ekonomi AS menjadi pertimbangan utama Presiden Donald Trump. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh AS untuk mengikuti Kesepakatan Paris membuat Donald Trump menunjukkan sikapnya terhadap perubahan iklim. Hal ini dimulai sejak tanggal 8 November 2016, empat hari setelah Kesepakatan Paris mulai berlaku di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump yang tidak memandang isu lingkungan sebagai sebuah isu penting yang menuntut perhatian khusus, bahkan ia mengubah banyak tindakan-tindakan dari Presiden Obama terkait isu lingkungan, dengan alasan mengganggu perekonomian Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sendiri, lebih percaya dengan konsep bahwa pemanasan global diciptakan oleh China untuk mengganggu daya saing Amerika. Selain itu, Selama kampanye Pemilu Trump tahun 2016, Trump berjanji untuk merevitalisasi industri batubara, yang diklaimnya telah terhambat oleh peraturan lingkungan hidup. Kebijakan Trump ini, dengan tajuk *America First*, akhirnya terbukti dengan penarikan diri AS dari Kesepakatan Paris. Kebijakan luar negeri dari pemerintahan Presiden Trump ini berupaya untuk mengedepankan kepentingan Amerika Serikat, baik dari sektor ekonomi, sosial dan politik.

Dinamika industri batubara Amerika Serikat yang semakin menurun dewasa ini merupakan faktor utama dari kepentingan ekonomi ini. Penurunan daya serap tenaga kerja dalam industri batubara, serta penurunan konsumsi batu bara Amerika yang mulai bergerak menuju energi bersih yang dimulai oleh mantan presiden Obama telah melemahkan industri batubara AS. Berdasarkan data dari *US Energy Information Administration (EIA)*, tercatat pada tahun 2016, produksi batubara AS turun 18,8% dari tahun ke tahun menjadi 728,4 juta ton, dan ini merupakan tingkat produksi tahunan terendah sejak 1979. Selain itu, jumlah rata-rata karyawan di tambang batu bara AS menurun 21,5% menjadi 51.795 karyawan pada tahun 2016, tingkat terendah yang pernah tercatat oleh EIA sejak tahun 1978. Hal ini mempengaruhi pula pada daya serap tenaga kerja AS. Berikut adalah grafik daya serap tenaga kerja AS dalam industri batubara, serta penurunan ekspor batubara AS.

Grafik Penurunan Daya Serap Tenaga Kerja Industri Batubara AS



Grafik Ekspor Batubara AS tahun 2001-2017



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan daya serap tenaga kerja, serta penurunan daya ekspor batubara AS yang terlihat sejak tahun 2010, menjadi faktor kunci presiden Donald Trump untuk memutuskan keluar dari Kesepakatan Paris. Peralihan industri dunia kepada industri energi bersih terbaru akan membuat penurunan industri batubara AS semakin signifikan, dan semakin banyak masyarakat AS yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini yang mendasari Donald Trump untuk membuat kebijakan yang mendahulukan kepentingan Amerika, yaitu untuk menjaga industri energi seperti industri batubara untuk tetap menjadi industri utama bagi penggunaan energi.

Hal ini bersesuaian dengan pengumuman di televisi dari *White House Rose Garden* pada tanggal 1 Juni 2017 oleh Donald Trump yang mengatakan bahwa untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi Amerika Serikat dan warganya, Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan iklim Paris, Intinya adalah kesepakatan Paris sangat tidak adil kepada Amerika Serikat. Karena bila kesepakatan tersebut diterapkan, akan merugikan Amerika Serikat sebesar 3 triliun dolar PDB dan 6,5 juta pekerjaan yang hilang. Donald Trump menambahkan pula bahwa hal itu akan melemahkan ekonomi AS, membendung pekerja AS, dan secara efektif menghentikan industri batubara aS. Donald Trump mengatakan bahwa dia terbuka untuk menegosiasikan ulang pengaturan atau menegosiasikan yang baru, namun para pemimpin Eropa dan PBB mengatakan bahwa pakta tersebut tidak dapat dinegosiasikan kembali atas permintaan satu pihak. Donald Trump juga mengkritik

Green Climate Fund, menyebutnya skema untuk mendistribusikan kekayaan dari negara kaya ke negara-negara miskin.

Mundurinya AS sendiri merupakan pilihan Donald Trump dengan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh presiden. Beberapa argumen utama dari presiden Donald Trump adalah hilangnya pekerjaan, peningkatan suhu yang kecil sekali, dampak negatif untuk ekonomi AS, serta berjuta-juta dolar yang terbuang percuma.

Donald Trump berasumsi bahwa jika AS mengikuti Kesepakatan Paris, hal ini dapat menyebabkan hilangnya total 2,7 juta pekerjaan di tahun 2025, menurut data dari *National Economic Research Associates*. Sekalipun begitu, laporan studi NERA ini telah dikritik oleh kelompok-kelompok lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh *World Resources Institute*, studi NERA menggunakan skenario yang dimana sektor industri AS dipaksa untuk mengurangi emisi keseluruhan AS sampai hampir 40% dalam tahun ke depan. Perhitungan ini tidak memperhitungkan peran sektor selain industri dalam mengurangi emisi.

Mengingat studi oleh NERA tidak memperhitungkan keuntungan potensial dari emisi yang dihindari, analisis *cost-benefit* dari perubahan iklim, dan pengaruh teknologi yang belum dikembangkan, Donald Trump telah gagal mempertimbangkan pekerjaan yang diciptakan dalam sektor energi terbarukan yang baru muncul. Kegagalan untuk menyeimbangkan argument hilangnya 2,7 juta pekerjaan atas ruang lingkup penciptaan lapangan kerja dalam energi terbarukan merupakan kelalaian yang sangat signifikan.

Potensi untuk pengembangan pekerjaan dalam teknologi angin dan tenaga surya yang mulai meningkat ditunjukkan oleh penilaian Departemen Energi AS di bulan Januari, bahwa tenaga kerja di sektor tenaga surya meningkat sebesar 25 persen pada tahun 2016, sementara tenaga kerja di sektor energi angin naik sebesar 32 persen. Pemerintahan Donald Trump juga terkait erat dengan industri bahan bakar fosil, dan kelompok-kelompok kepentingan adalah yang menentukan Politik Amerika. Industri bahan bakar fosil memegang kuat pengaruh politik atas pemerintahan Donald Trump dan Partai Republik. Dilaporkan bahwa Donald Trump, Wakil Presiden Pence dan Administrator EPA Scott Pruitt semuanya terkait erat dengan perusahaan petrokimia *Koch Industries*. Setelah AS menarik diri dari Perjanjian Paris, Pemerintahan Donald Trump akan berusaha mencabut peraturan iklim untuk menguntungkan perusahaan energi, termasuk *Koch Industries*. Administrator EPA Scott Pruitt, yang melawan *Clean Power Plan* yang diajukan oleh mantan Presiden Obama secara hukum, berulang kali menolak penyebab-penyebab antropogenik dari pemanasan global, dan bersikeras mundur dari Perjanjian Paris.

Presiden Donald Trump skeptis terhadap perubahan iklim, dan Donald Trump menolak untuk mengakui prinsip dasar umum berupa tanggung jawab yang dibedakan dalam kerjasama iklim global. Donald Trump juga tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa perubahan iklim terjadi dan disebabkan oleh manusia, sekalipun ini adalah konsensus oleh sebagian besar ilmuwan di AS. Dalam pidato penarikannya, Donald Trump menyatakan bahwa Kesepakatan Paris sangat tidak adil hingga tingkat tertinggi ke AS dan membandingkan kewajiban mitigasi China dan India dengan

AS. Hal ini membuat sangat sulit untuk mengubah pandangan Donald Trump terhadap perubahan iklim internasional.

Penekanan Donald Trump yang tidak semestinya pada *America First* secara signifikan adalah tanggapan atas kebijakan luar negeri Obama. Secara ekonomi, Obama percaya bahwa Perjanjian Paris meningkatkan keamanan iklim Amerika, mempromosikan ekonomi rendah karbon dan industri energi terbarukan Amerika, dan merupakan sebuah komponen penting untuk mengamankan pekerjaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif AS. Sebaliknya, Donald Trump percaya bahwa Perjanjian Paris menurunkan keunggulan kompetitif AS dan mengganggu ketenagakerjaan dan industri energi tradisional. Secara politik, Obama percaya bahwa Perjanjian Paris akan memperkuat kepemimpinan AS di tingkat internasional, sedangkan Donald Trump percaya bahwa perjanjian melemahkan kedaulatan AS. Sebagai seseorang yang skeptis terhadap iklim, Donald Trump memberikan beban yang berat untuk biaya ekonomi mitigasi iklim dan tidak mengindahkan keuntungan ekologis dan ekonomisnya, yang konsisten dengan pandangannya atas *America First* yang nasionalis dan isolasionis.

Selain kerugian atas biaya yang harus dialokasikan untuk mengaplikasikan Kesepakatan Paris, Amerika juga menerima dampak yang mempengaruhi perekonomian mereka yaitu beralihnya fokus energi dunia kepada energi terbarukan. Seiring meningkatnya dampak yang disebabkan oleh penggunaan energi tradisional seperti batubara dan minyak bumi, teknologi yang digunakan oleh manusia, baik industri maupun penggunaan umum dikembangkan agar dapat lebih ramah lingkungan dan bahkan menggunakan energi terbarukan untuk aktivitasnya. Hal ini tentu saja bertentangan besar dengan upaya Presiden Donald Trump untuk revitalisasi industri batubara Amerika Serikat, karena bila negara-negara di dunia tidak lagi hanya menggunakan bahan bakar konvensional tetapi juga mulai menggunakan energi-energi terbarukan, permintaan atas batubara dan bahan bakar fosil akan menurun dan di masa depan dapat melemahkan pasar AS.

Sikap Presiden Donald Trump yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi AS, karena besarnya kerugian yang diproyeksikan sangat besar, serta pasar batubara Amerika Serikat yang akan terganggu oleh peraturan-peraturan baru di Kesepakatan Paris yang berusaha mengubah negara-negara untuk beralih kepada perekonomian yang ramah lingkungan.

Kepentingan Politik

Selain kepentingan ekonomi, terdapat pula kepentingan politik dari dalam maupun dari luar Amerika yang turut memberikan andil dalam keputusan mundurnya AS. Dari internal AS sendiri, pada tanggal 25 Mei 2017, sebanyak 22 Senator dari partai Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, mengirim sebuah surat kepada Donald Trump yang mendesak Presiden untuk menarik AS dari kesepakatan Paris. Surat tersebut disusun oleh Senator John Barrasso, ketua Komite Senat untuk Lingkungan dan Pekerjaan Umum, dan Senator Jim Inhofe, yang dikenal karena penolakannya terhadap perubahan iklim.

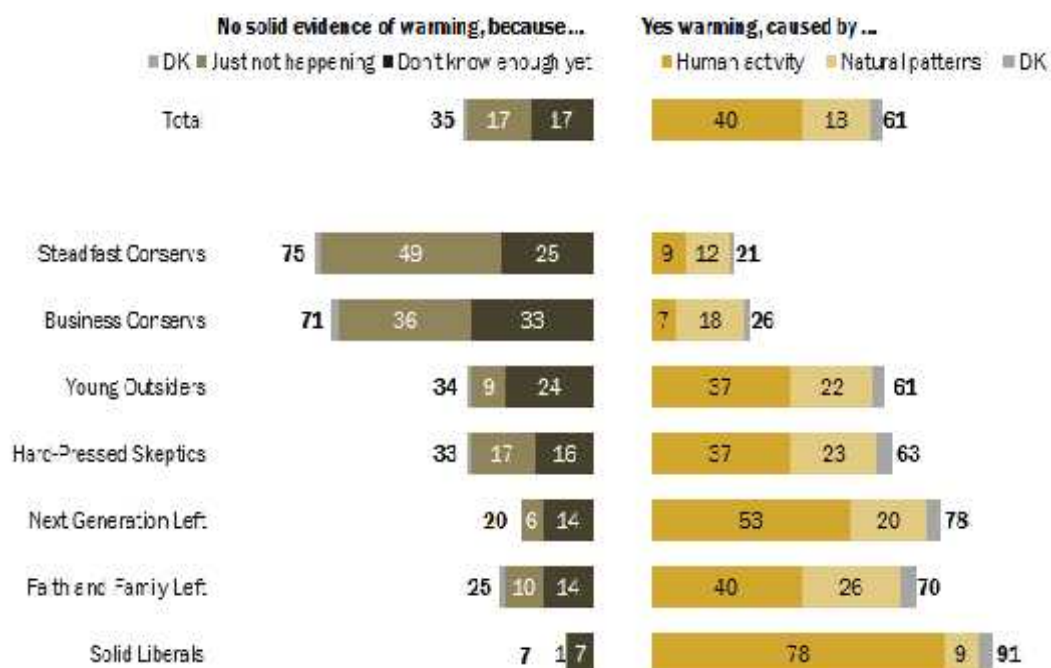
Sebagian besar penandatanganan surat tersebut dipilih dari negara-negara bagian AS yang bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak dan gas). Selain dari segi politiknya, kelompok yang terdiri dari 22 senator ini secara kolektif menerima lebih dari \$10 juta kontribusi kampanye dari perusahaan bahan bakar fosil selama tiga periode pemilu. Pada minggu yang sama pula, sebanyak 40 Senator dari partai Demokrat berkelompok dan mengirim sebuah surat kepada Presiden Donald Trump, mendesak Presiden untuk mempertahankan Amerika dalam Perjanjian Paris, dengan mengatakan bahwa penarikan AS dari Kesepakatan Paris akan mengurangi kredibilitas dan pengaruh Amerika di panggung dunia.

Desakan pihak konservatif di AS memiliki andil besar pada pemutusan kebijakan untuk mundur dari Kesepakatan Paris. Tercatat dalam data oleh *Pew Research Center*, pebisnis konservatif dan konservatif yang teguh tidak menganggap pemanasan global sebagai masalah yang utama.

Grafik Survei *Pew Research Center* tentang Pandangan terhadap Pemanasan Global

Steadfast and Business Conservatives Say No Solid Evidence of Global Warming

% who say...



2014 Political Typology Q057/Q058a-b. Subgroups may not add to NETs because of rounding.

FEW RESEARCH CENTER

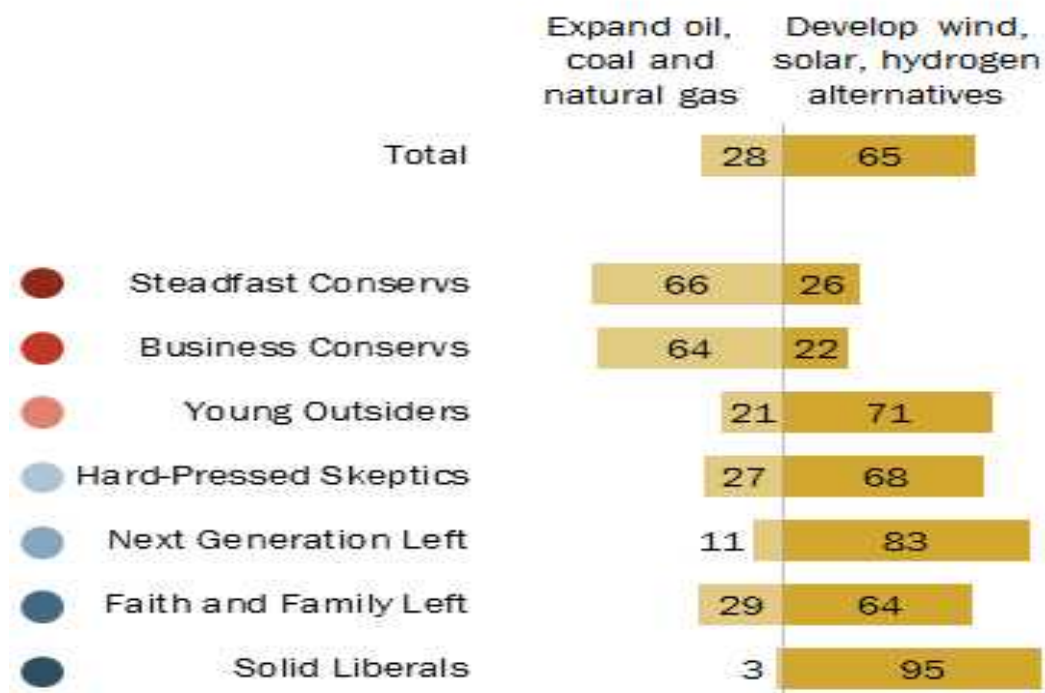
Sumber: <http://www.people-press.org/2014/06/26/section-7-global-warming-environment-and-energy/>

Data di atas menunjukkan condongnya para pihak-pihak konservatif menolak adanya pemanasan global. Selain itu, pihak konservatif juga menolak memberikan dukungan untuk pengembangan energi alternatif, seperti pada grafik berikut.

Grafik Survei *Pew Research Center* tentang Dukungan untuk Energi Alternatif

Alternative Energy Widely Supported, Except by Conservative Groups

% who say ...



2014 Political Typology. QB107.

PEW RESEARCH CENTER

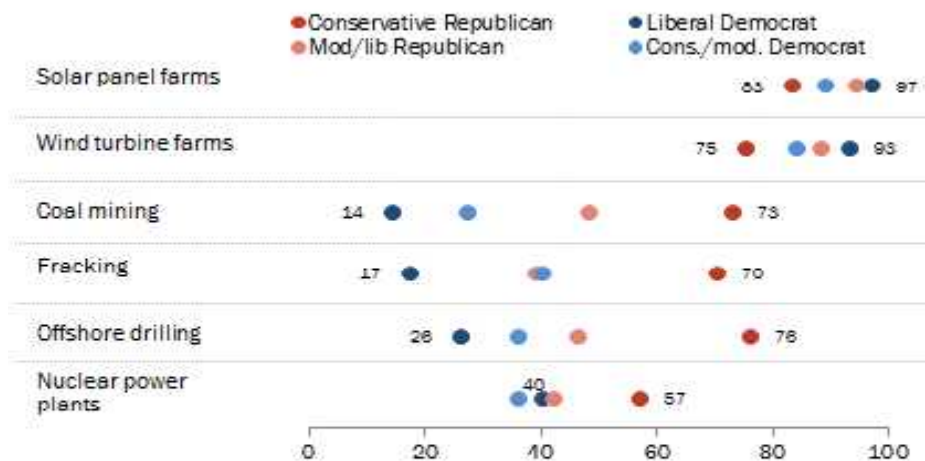
Sumber: <http://www.people-press.org/2014/06/26/section-7-global-warming-environment-and-energy/>

Dukungan yang besar atas energi konvensional seperti minyak bumi dan batubara memberikan gambaran yang jelas atas penentuan kepentingan politik AS. Pihak-pihak demokrat lebih memilih energi alternatif terbarukan, sedangkan pihak konservatif mendukung konservasi energi konvensional. Hal ini juga muncul dalam pandangan politik pihak konservatif, seperti dalam grafik berikut.

Grafik Survei Pew Research Center tentang Pandangan Politik atas Sumber Energi

Strong political divide over expanding fossil fuels; but mostly agreement on renewable energies

% of U.S. adults who say they favor expanding each energy source



Note. Republicans and Democrats include independents and other non-partisans who "lean" toward the parties. Respondents who do not lean toward a political party and other responses on each question are not shown.

Source: Survey conducted May 10-June 6, 2016.

"The Politics of Climate"

PEW RESEARCH CENTER

Sumber: <http://www.pewinternet.org/2016/10/04/public-opinion-on-renewables-and-other-energy-sources/>

Baik dukungan untuk penarikan diri dan pertentangan atas Kesepakatan Paris dilaporkan di antara kabinet dan penasihat Donald Trump, yaitu Sekretaris Energi Rick Perry, Sekretaris Negara Rex Tillerson, penasihat ekonomi Gary Cohn, dan penasihat hukum Jared Kushner. Mereka melaporkan ingin Amerika Serikat tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut, sementara Penasehat Gedung Putih Steve Bannon, Penasihat Gedung Putih Don McGahn, dan Administrator EPA Scott Scott Pruitt ingin Amerika Serikat menarik diri.

Kepentingan Politik AS datang dari desakan industri energi konvensional melalui perwakilan-perwakilan daerah. Industri-industri ini, melalui donasi bantuannya kepada Senat dan Kongres, berusaha memajukan kepentingan ekonomi mereka di ranah politik. Hal ini bersesuaian pula dengan Presiden Donald Trump yang telah berhasil menarik simpati dari mereka melalui kampanye presidennya yang lalu, serta mengatasnamakan masyarakat Amerika yang akan kehilangan pekerjaannya jika Kesepakatan Paris dilaksanakan secara sempurna. Gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump yang berbeda dengan Presiden sebelumnya, Barack Obama, merupakan momen yang tepat bagi aktor-aktor dari industri konvensional ini untuk memajukan agenda ekonomi mereka di ranah politik. Trend dunia yang mulai meninggalkan energi konvensional seperti batubara dan minyak bumi juga membuat AS mengkhawatirkan pasar minyak dan batubara yang dimilikinya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan mundurnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris merupakan keputusan yang diambil berdasarkan sikap Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, serta desakan-desakan politik baik dari dalam maupun luar negeri. AS yang telah banyak mengubah regulasi lingkungan di masa pemerintahan Obama hingga berhasil menjadi pionir untuk mitigasi perubahan iklim, yaitu Kesepakatan Paris, harus berhenti di masa pemerintahan selanjutnya. Hal ini menyebabkan AS menerima *moral bankruptcy*, karena Kesepakatan Paris yang tidak bersifat mengikat secara hukum, menyebabkan masyarakat dunia kehilangan rasa percaya kepada AS sebagai salah satu penghasil karbon terbesar dunia. Komitmen untuk menahan laju perubahan iklim yang dulu dikemukakan tidak lagi menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintahan.

Pada masa kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat memang berupaya mengembangkan kembali kejayaan ekonominya, terlihat dari kebijakan *America First* yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, yaitu Barack Obama yang cenderung mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama seperti krisis lingkungan global. Hal ini juga tidak lepas dari kelompok pendukung masing-masing presiden yang memang berbeda, karena Trump didukung oleh kubu republik yang memiliki agenda-agenda politik-ekonomi, sedangkan Obama didukung oleh kubu Demokrat yang cenderung kooperatif terhadap dunia internasional. Karena hal ini juga, Trump memutuskan AS untuk keluar dari Kesepakatan Paris.

Namun, masyarakat Amerika yang lebih sadar atas urgensi masalah lingkungan, dan mereka berinisiatif untuk lebih aktif dalam mengurangi emisi karbon mereka. Selain menyatakan sikap pro-lingkungan, masyarakat umum juga lebih mementingkan lingkungan global dari keuntungan beberapa industri lokal di Amerika.

Daftar Pustaka

Buku

Carlsnaes, Walter. Risse, Thomas. Simmons, Beth A. *Handbook Hubungan Internasional*. 2015. Bandung: Nusa Media.

Hennida, Citra. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. 2015. Malang: Intrans Publishing.

Jernadu, Aleksius. *"Politik Global dalam Teori dan Praktik"*, 2008. Yogyakarta: Graha Ilmu.

K.J. Holsti, 1984, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, New Delhi: Prentice Hall of India

Robert, Jackson dan Georg, Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. 2011. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Lain

2017 US Energy and Employment Report, oleh Departemen Energi AS, tersedia di: <https://www.energy.gov/downloads/2017-us-energy-and-employment-report>, diakses 28 Mei 2018

America First Foreign Policy, tersedia di: <https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/>, diakses pada 27 Februari 2018

Easley, Jonathan, *Trump cements 'America First' doctrine with Paris withdrawal*, tersedia di: <http://thehill.com/homenews/administration/336014-trump-cements-america-first-doctrine-with-paris-withdrawal>, diakses pada 27 Februari 2018

Center for Climate and Energy Solutions, *Dear President Trump*, tersedia di: <https://www.c2es.org/content/business-support-for-the-paris-agreement/>, diakses 28 Februari 2018

Liptak, Kevin; Acosta, *Trump on Paris accord: 'We're getting out*, tersedia di: <https://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html>, diakses 27 Februari 2018

Marketwatch, *Business leaders join environmentalists in throwing up their hands as Trump quits Paris pact*, tersedia di: <https://www.marketwatch.com/story/business-leaders-join-environmentalists-in-negative-reactions-to-trumps-quitting-paris-pact-2017-06-01>, diakses 28 Februari 2018

Mayer, J., *In the withdrawal from the Paris Climate Agreement, the Koch Brothers' campaign becomes overt*. Tersedia di: <http://www.newyorker.com/news/news-desk/in-the-withdrawal-from-the-paris-climate-agreement-the-koch-brothers-campaign-becomes-overt>, diakses 28 Mei 2018

Paris climate deal: *Trump announces US will withdraw*, tersedia di: <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40127326>, diakses pada 27 Februari 2018

Samuelsohn, Darren, *Fact: Trump claimed climate change is a hoax created by China*, tersedia di: <https://www.politico.com/blogs/2016-presidential-debate-fact-check/2016/09/fact-trump-claimed-climate-change-is-a-hoax-created-by-china-228711>, diakses pada 27 Februari 2018

Smilowitz, Elliot, *Trump: We are getting out of Paris climate deal*, tersedia di: <http://thehill.com/policy/energy-environment/335955-trump-pulls-us-out-of-paris-climate-deal>, diakses pada 27 Februari 2018

Somini Sengupta, Melissa Eddy, Chris Buckley dan Alissa J. Rubin, *As Trump Exits Paris Agreement, Other Nations Are Defiant*, tersedia di: <https://www.nytimes.com/2017/06/01/world/europe/climate-paris-agreement-trump-china.html>, diakses 27 Februari 2018

The Daily Telegraph, *Trump abandons Paris climate change agreement: How the business world reacted*, tersedia di: <https://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/02/trump-abandons-paris-climate-change-agreement-business-world/>, diakses 28 Februari 2018

The Daily Telegraph, *Washington can't stop Americans': Michael Bloomberg pledges to pay US share of Paris climate funding*, tersedia di: <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/02/washington-cant-stop-americans-michael-bloomberg-pledges-pay/>, diakses 28 Februari 2018

The White House, *Statement By President Trump on the Paris Climate Accord*, Tersedia di: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord>, diakses 28 Mei 2018